

**KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**



1950

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI

PEMERINTAH

(L A K I P)

TAHUN 2007

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Limpahan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (LAKIP) tahun anggaran 2007 unit Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (LAKIP) tahun 2007 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan organisasi.

Kepada Bapak Bupati Lamongan, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjalankan tugas dan fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

Kepada semua staf Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi agenda Kantor Polisi Pamong Praja, dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan.

Lamongan, 31 Januari 2008

**KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**



Drs. SUWADJI, MM

Pembina Tk I

Nip. 010 086 158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB	I.	PENDAHULUAN	
	A.	ASPEK STRATEGIS.....	1
	B.	STRUKTUR ORGANISASI.....	3
BAB	II	PERENCANAAN STRATEGIK	
	A.	Perencanaan Strategik.....	4
	1.	Visi.....	4
	2.	Misi	4
	3.	Tujuan	4
	4.	Sasaran.....	5
	5.	Dasar Hukum.....	6
	B.	Perencanaan Kinerja Tahun 2008	
	a.	Kegiatan Rutin.....	6
	b.	Kegiatan Pembangunan	7
BAB	III	AKUNTABILITAS KERJA	
	A.	Analisa Pencapaian Kinerja	9
	B.	Akuntabilitas Keuangan.....	10
BAB	IV	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	11
	B.	Saran	12
LAMPIRAN – LAMPIRAN			
	-	Rencana Strategis.....	16
	-	Rencana Kerja Tahunan.....	19
	-	Pengukuran Kinerja Kegiatan.....	21
	-	Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	23

IKTISAR EKSKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Bab III Pasal 6 (enam) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak Kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapat fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pasal 7 (tujuh) dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib;

- a. Menjunjung Fungsi Norma Hukum, Norma Agama, Hak Asasi Manusia dan Norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisian Warga Masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan Kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d. Menyerahkan Kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pakaian Dinas, perlengkapan dan peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan dalam melaksanakan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal.

Kerjasama dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat kerjasama dengan Kepolisian Negara dan lembaga-lembaga lain didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik, profesi dan birokrasi.

Lamongan, 31 Januari 2008

**KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**



Drs. SUWADJI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 086 158

BAB I PENDAHULUAN

A.DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan nomor 21 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja antara lain ;

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang berdiri dan bertanggung jawab kepada daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Kewenangan di bidang Ketentraman dan Ketertiban .
3. Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - b. Menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - c. Melaksanakan pedoman dan petunjuk operasional penertiban peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.
 - d. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - e. Pelaksanaan penertiban masyarakat dan pengamanan, perijinan, pemeriksaan ,penindakan,pengawalan dan kesamaptaan.
 - f. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan sarana kerja polisi Pamong Praja.

- g. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis.
- h. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan , kepegawaian dan keuangan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DATA : PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2007

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Kantor	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S-2	
2	Kasubbag. Tata Usaha				
3	Kasi Operasi dan Pengamanan	Penata Tk. I (III/d)	1	S-1	
4	Kasi Penyidikan dan Penindakan	Penata Tk. I (III/d)	1	S-1	
5	Kasi Pembinaan Umum dan Kesamaptaan	Penata Tk. I (III/d)	1	SLTA	
6	Staf	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	SLTA	
		Penata Muda (III/a)	6 7	S-1 SLTA	

		Pengatur Tk. I (II/d)	2	SLTA	
		Pengatur Muda Tk. I (II/b)	7	SLTA	
		Pengatur Muda (II/a)	6 1	SLTA SD	
		Juru Tk. I (I/d)	1	SLTP	
		Tenaga Kontrak	2	S-1	
		Tenaga Kontrak	25	SLTA	
		Banpol. PP	68	SLTA	
	J U M L A H		131		

**SARANA DAN PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2007**

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Dinas Kepala Kantor Pol PP Kab. Lamongan.	1 Unit	Isuzu Panther
2.	Kendaraan Patroli / Operasi	3 Unit	Isuzu Panter
3.	Truck	1 Unit	Isuzu Elf
4.	Kendaraan Dinas Patwal	1 Unit	Daihatsu Taruna
5.	Sepeda Motor Dinas Patwal	2 Unit	Honda Tiger
6.	Sepeda Motor Dinas Operasi	6 Unit	Honda Win dan Suzuki A 100
7.	Sepeda Motor Dinas	5 Unit	Suzuki Thunder
8.	Sepeda Gunung	5 Unit	
9.	Senjata Api	6 Unit	- Peluru Karet = 2 Buah - Peluru Gas = 4 Buah
10.	Handy Talky	4 Buah 16 Buah	Kenwood ICOM.ic.v8 ICOM.ic.v8 (Mako,Pos I,II,III) Jacom
11.	Komputer	2 Buah	
12.	Mesin ketik	7 Unit	
13.	Kipas angin	4 Unit	
14.	AC	5 Unit	
15.	TV 21 "	1 Unit	
16.	Pesawat Rig	1 Unit	
17.	Perlengkapan Dalmas	4 Unit	
	a. Helem	62 Buah	
	b. Tameng Viber Glas	62 Buah	
	c. Tongkat	81 Buah	
	d. Tameng Rotan	50 Buah	
18.	Tenda Peleton	1 Buah	
19.	Karvet	14 Buah	
20.	Tali Peluncuran	1 Roll	
21.	Tali Tagel Tool	10 Buah	
22.	Cincin Kait	10 Buah	
23.	Tali Rafling	1 Roll	
24.	Kaos Tangan Kulit	20 Buah	
25.	Track Katrol	1 Buah	
26.	Brankas	1 Unit	
27.	Metal Detector	2 Unit	
28.	Kamera	1 Buah	
29.	Wireless	1 Buah	
30.	Laktop	1 Buah	
31.	Alat Las Listrik	1 Unit	Honda SH 100
32.	Gen Sheat	1 Buah	

LAKIP KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban serta dalam peningkatan sumber daya personil Satuan Polisi Pamong Praja yang tangguh Trampil dalam melaksanakan tugas dilapangan, bekerjasama dengan dinas Instansi terkait serta TNI, POLRI untuk tugas keamanan, ketertiban dan Wilayah kecamatan bekerjasama dengan Camat dan Kasi trantib kecamatan yang bekerjasama dengan Polsek setempat.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit maupun dengan unit lainnya.

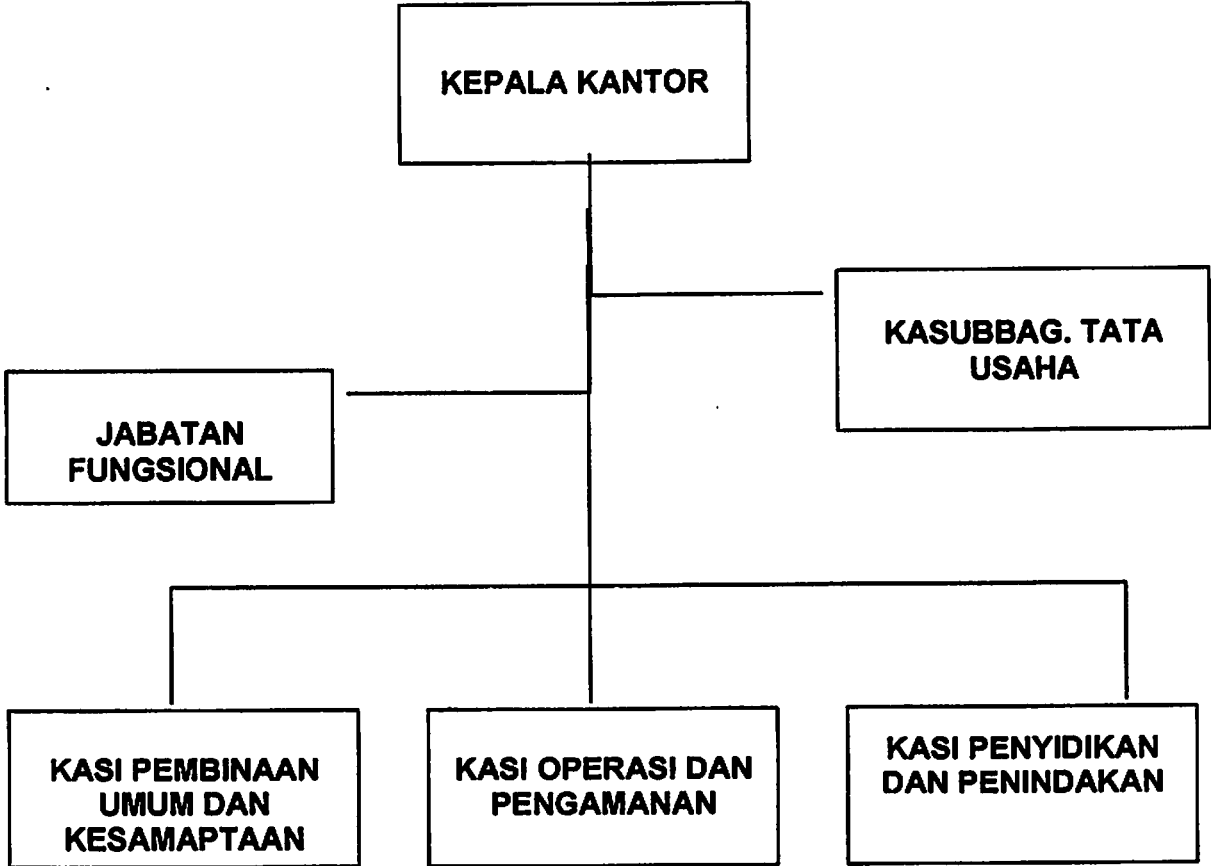
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala kantor
2. Subag Tata Usaha
3. Seksi Pembinaan Umum dan Kesamaptaan
4. Seksi Operasi dan Pengamanan
5. Seksi Penyidikan dan Penindakan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah nomor 21 Tahun 2001 bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan mempunyai struktur sebagai berikut.

Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.



Keterangan

- **Dasar Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2001**

BAB II

PERENCANAAN STRATEGI

1. VISI

Mewujudkan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagai penegak dan pengayom masyarakat.

Penjelasan Visi :

Memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban sehingga tercapai penegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah melalui pendekatan sosial (social approach) yang melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih intens.

2. MISI

- a. Mewujudkan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagai pengaman, penegak dan pengayom masyarakat.
- b. Terciptanya situasi keamanan daerah yang kondusif.
- c. Menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan Keputusan Bupati.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan POLRI, TNI dan Dinas / Instansi terkait serta aparat penegak hukum.
- e. Mendorong terciptanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. TUJUAN

- a. Terwujudnya ketentraman masyarakat tertib hukum dan tertib sosial.
- b. Terwujudnya peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan.

- c. Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang profesional dalam melaksanakan tugas
- d. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya.
- e. Terwujudnya kemadirian masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya.
- f. Terwujudnya koordinasi yang mantap antara Kantor Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya .
- g. Terwujudnya koordinasi yang mantap antara Kantor Polisi Pamong Praja dengan Dinas / Instansi lainya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya (Keputusan Kepala Daerah).

4.SASARAN

- a. Meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Meningkatkan kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini dari berbagai gejala sosial dan politi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Berkurangnya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya (Keputusan Kepala Daerah).
- d. Terpenuhinya jumlah anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan obyektif.
- e. Terpenuhinya jumlah PPNS sesuai dengan kwalifikasi yang dibutuhkan.

- f. Menurunnya perilaku negative masyarakat yang dapat merusak kondisi sosial.
- g. Meningkatnya ketertiban masyarakat didalam penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa, kerusuhan dll, yang dapat mengganggu masalah ketentraman dan ketertiban umum.

Perencanaan Kinerja Tahun 2008

A. Kegiatan Rutin

(1) Ketatausahaan

- a). Melaksanakan urusan surat menyurat.
- b). Melaksanakan urusan keuangan.
- c). Melaksanakan urusan kepegawaian.
- d). Melaksanakan urusan pelaporan dan perencanaan.
- e). Melaksanakan kegiatan kearsipan.

(2) Pembinaan umum dan Kesamaptaan.

- a). Melaksanakan pembinaan PKL, Para Pengusaha dan Penyuluhan kepada masyarakat.
- b). Melaksanakan kegiatan kesamaptaan secara rutin.
- c). Melaksanakan Kegiatan HUT Sat Pol PP yang di laksanakan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten

(3) Operasi dan Pengamanan

- a). Melaksanakan Operasi Penertiban WTS / PSK.
- b). Melaksanakan Operasi Penertiban Perijinan.

- c). Melaksanakan Operasi Penertiban Bangunan Liar.
- d). Melaksanakan Operasi Penertiban reklame.
- e). Melaksanakan Operasi Penertiban Orang Gila.
- f). Melaksanakan Operasi Penertiban PKL.
- g). Melaksanakan Operasi Penertiban Minuman Keras.
- h). Melaksanakan Operasi Penertiban KTP.
- i). Melaksanakan Pengamanan terbuka.
- j). Melaksanakan Patroli Pengamanan Wilayah.
- k). Melaksanakan Pengamanan terhadap pejabat – pejabat Negara dan Daerah.
- l). Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait.

(4) Penyidikan dan Penindakan .

- a). Melaksanakan proses penyidikan hasil operasi (BAP) dan pengajuan ke Pengadilan Negeri.
- b). Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait .
- c). Memberikan saran pertimbangan tim komisi dalam penertiban surat ijin dari segi gangguan (HO).
- d). Pemberian surat teguran / peringatan kepada pelanggaran PERDA dan pemilik yang habis masa berlakunya, serta pelanggaran ijin.

B.Kegiatan Pembangunan

- (1).Pembinaan Trantibum
- (2).Pembinaan Kesamaptaan dan Peningkata SDM Anggota Sat Pol PP Kabupaten dan Kasie Trantib Kesamatan Se Kab Lamongan
- (3).Penjaringan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (4).Pengamanan Wilayah terpadu.
- (5).Kegiatan Operasi Yustisi dan Penegakan Perda.
- (6).Operasi Trantibum
- (7).Operasi Penertiban PNS dan Pemakai Kendaraan Dinas
- (8).Peringatan HUT dan Jambore Sat Pol PP se- Prop Jatim

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Kantor Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai arah kebijaksanaan umum dan ketentraman Kabupaten Lamongan Tahun 2007 hal tersebut dapat dilihat dari kondisi Kabupaten yang kondusif pada tahun 2007.

Analisa Pencapaian Kerja

1. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin dapat dilaksanakan 100% dilaksanakan dalam pembuatan Lakip ini sampai bulan Desember .

2. Kegiatan Pembangunan

Kegiatan pembangunan dengan enam sasaran dengan diuraikan sebagai berikut :

a) Sasaran 1

Terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif dengan cara sosialisasi dan pembinaan kepada para Kasi Trantib Kecamatan se-Kabupaten Lamongan, pembinaan para pengusaha dan pedagang kaki lima (PK 5).

b) Sasaran 2

Peningkatan Ijin usaha dan Kesamaptaan.

- Pembinaan kesamaptaan bagi anggota Satpol.PP Kabupaten Lamongan dan Kecamatan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

c). Sasaran 3

Penertiban dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penertiban (Operasi WTS) Orgil, Gepeng dan anjal.

d). Sasaran 4

Operasi Wilayah Terpadu, pelaksanaannya operasi dilakukan dengan koordinasi Dinas terkait, TNI, Polri, Trantib Kecamatan dan Polsek.

e). Sasaran 5

Operasi yustisi Penegakan Perda dan Keputusan Bupati dengan kegiatan meliputi Operasi terpadu dengan unsur TNI, Polri dengan sasaran Operasi WTS, Miras dan Pengusaha di wilayah Kabupaten Lamongan.

f). Sasaran 6

Operasi Penertiban meliputi sasaran Operasi KTP dan Penertiban bahan material di pinggir jalan.

G). Sasaran 7

Operasi penertiban PNS dan Pemakai Kendaraan dinas pelaksanaanya berkoordinasi dengan instansi terkait dengan harapan dapat meningkatkan disiplin PNS dan Pemakain kendaraan Dinas.

h). Sasaran 8

Peringatan HUT dan Jambore Sat Pol PP Se- Prop Jatim berharap dapat meningkatkan kualitasnya

Rencana Kinerja

Jumlah dana yang dianggarkan tahun 2007 sebesar Rp. 3.056.222.500,- yang untuk kegiatan belanja tidak langsung Rp. 1.654.513.000,- dan belanja langsung Rp. 1.401.709.500,- dan realisasi pelaksanaan selama tahun 2007 sebesar Rp. 2.748.154.858,- yaitu kegiatan belanja tidak langsung Rp. 1.427.289.708,- dan belanja langsung Rp. 1.320.865.150,-

**BAB IV
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Dalam upaya untuk mencapai tujuan seperti yang telah diuraikan dihalaman depan , dengan Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam kegiatan – kegiatan, maka Kantor Polisi Pamong Praja telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan 6 sasaran dari 6 kegiatan, yang telah dituangkan dalam rencana strategic, adapun fungsi yang dominan dalam pelaksanaan tugas – tugas tersebut adalah melaksanakan ketertiban umum.

strategic, adapun fungsi yang dominan dalam pelaksanaan tugas – tugas tersebut adalah melaksanakan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaan tugas – tugas dengan 8 sasaran dan 8 kegiatan dapat diperoleh dengan hasil yang terbaik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil capaian kinerja yaitu 100%.

Dari segi anggaran, untuk anggaran dapat terealisasi 95,45% hal tersebut dikarenakan pada waktu penyusunan Lakip ini penutupan anggaran sampai dengan bulan Desember 2007.

B. SARAN

Untuk selalu dapat mempertahankan tugas – tugas seperti yang telah dilaksanakan seperti sekarang ini maka perlu :

1. Dukungan dari pihak Legislatif agar program dan sasaran dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah.
2. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Form RS
- Form PKT
- Form PKK
- Form PPS

Lamongan, 31 Januari 2008

KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. SUWADJI, MM

Pembina Tk I
Nip. 010 086 158



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2007**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH	2.879.233.000	3.056.222.500,00	2.748.154.858,00	308.067.642,00	89,92%	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.607.636.000	1.654.513.000,00	1.427.289.708,00	227.223.292,00	86,27%	
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.607.636.000	1.654.513.000,00	1.427.289.708,00	227.223.292,00	86,27%	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.124.182.000	1.124.182.000,00	947.604.708,00	176.577.292,00	84,29%	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	798.999.880	829.801.000,00	663.893.111,00	165.907.889,00	80,00%	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	85.880.000	74.447.000,00	72.881.642,00	1.565.358,00	97,90%	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	33.462.000	45.664.000,00	41.580.000,00	4.084.000,00	91,06%	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	98.885.000	82.336.000,00	79.450.000,00	2.886.000,00	96,49%	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.041.000	67.773.000,00	66.454.960,00	1.318.040,00	98,06%	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.575.000	10.265.000,00	9.780.785,00	484.215,00	95,28%	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.000	24.000,00	22.663,00	1.337,00	94,43%	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.306.120	13.872.000,00	13.541.547,00	330.453,00	97,62%	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	483.454.000	530.331.000,00	479.685.000,00	50.646.000,00	90,45%	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	483.454.000	530.331.000,00	479.685.000,00	50.646.000,00	90,45%	
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.271.597.000	1.401.709.500,00	1.320.865.150,00	80.844.350,00	94,23%	
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	847.697.000	908.844.500,00	838.339.500,00	70.505.000,00	92,24%	
5.2.1.01	Honorarium PNS	348.100.000	378.700.000,00	364.215.000,00	14.485.000,00	96,18%	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	194.200.000	194.200.000,00	193.390.000,00	810.000,00	99,58%	
5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Lapangan	153.900.000	184.500.000,00	170.825.000,00	13.675.000,00	92,59%	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	461.597.000	492.144.500,00	448.815.500,00	43.329.000,00	91,20%	
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	442.197.000	472.744.500,00	433.015.500,00	39.729.000,00	91,60%	
5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan/kasar	7.200.000	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	50,00%	
5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	7.200.000	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00%	
5.2.1.03	Uang Lembur	18.000.000	18.000.000,00	17.809.000,00	191.000,00	98,94%	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.800.000	13.800.000,00	13.633.000,00	167.000,00	98,79%	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.200.000	4.200.000,00	4.176.000,00	24.000,00	99,43%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.05	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis FNS	20.000.000	20.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00	37,50%	
5.2.1.05.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	9.500.000	9.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	78,95%	
5.2.1.05.03	Belanja bimbingan teknis	10.500.000	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%	
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	386.500.000	394.400.000,00	384.310.650,00	10.089.350,00	97,44%	
5.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai	81.229.100	81.229.100,00	81.229.100,00	0,00	100,00%	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	22.933.600	22.933.600,00	22.933.600,00	0,00	100,00%	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	862.500	862.500,00	862.500,00	0,00	100,00%	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.400.000	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.433.000	54.433.000,00	54.433.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	600.000	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	7.000.000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.697.500	45.897.500,00	40.149.150,00	5.748.350,00	87,48%	
5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.600.000	9.600.000,00	5.084.670,00	4.515.330,00	52,97%	
5.2.2.03.02	Belanja air	900.000	900.000,00	465.900,00	434.100,00	51,77%	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.500.000	5.500.000,00	5.326.080,00	173.920,00	96,84%	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	97.500	97.500,00	97.500,00	0,00	100,00%	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000	1.000.000,00	375.000,00	625.000,00	37,50%	
5.2.2.03.15	Belanja jasa publikasi, dokumentasi, dekorasi	18.600.000	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.03.16	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tang	7.000.000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000	54.500.000,00	54.200.000,00	300.000,00	99,45%	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	850.000	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.000.000	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	850.000	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.693.400	31.693.400,00	31.678.400,00	15.000,00	99,95%	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	19.084.000	19.084.000,00	19.069.000,00	15.000,00	99,92%	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.609.400	12.609.400,00	12.609.400,00	0,00	100,00%	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00%	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00%	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.750.000	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	1.250.000	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.030.000	79.030.000,00	79.010.000,00	20.000,00	99,97%	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	50.660.000	50.660.000,00	50.660.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.620.000	7.620.000,00	7.600.000,00	20.000,00	99,74%	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lokakarya dan	18.750.000	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.925.000	20.925.000,00	20.925.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.12.06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	4.075.000	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.900.000	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	13.900.000	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Pengawalan Khusus Pejabat Negara dan Daerah	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.700.000	47.700.000,00	46.194.000,00	1.506.000,00	96,84%	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00%	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.200.000	35.200.000,00	33.694.000,00	1.506.000,00	95,72%	
5.2.3	BELANJA MODAL	37.400.000	98.465.000,00	98.215.000,00	250.000,00	99,75%	
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	7.400.000	7.400.000,00	7.150.000,00	250.000,00	96,62%	
5.2.3.08.01	Belanja modal Pengadaan mesin las	7.400.000	7.400.000,00	7.150.000,00	250.000,00	96,62%	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Genset	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00%	
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%	
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	10.500.000	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.500.000	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	8.000.000	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%	
5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	0	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%	
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	48.515.000,00	48.515.000,00	0,00	100,00%	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	PERSENTASE	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.30.06	Belanja modal Pengadaan perisai/tameng	0	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.30.09	Belanja modal Pengadaan pentungan	0	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.30.10	Belanja modal Pengadaan helm	0	14.725.000,00	14.725.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.30.15	Belanja Modal Pengadaan Rompi Dakura Sipil	0	14.725.000,00	14.725.000,00	0,00	100,00%	
5.2.3.30.16	Belanja modal pengadaan sepatu dalmas	0	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00%	
	JUMLAH BELANJA	2.879.233.000,00	3.056.222.500,00	2.748.154.858,00	308.067.642,00		
	(DEFISIT)	(2.879.233.000,00)	(3.056.222.500,00)	(2.748.154.858,00)	(308.067.642,00)		

Lamongan, 3/ Januari 2008

Mengetahui

KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA



Drs. SUWADJI, MM

NIP : 010 086 158

RENCANA STRATEGIS

Instansi : Kantor Polisi Pamong Praja
 VISI : Mewujudkan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten

MISI : 1. Mewujudkan Pol.PP Kab.Lamongan sebagai pengayom, penegak dan pengayom masyarakat

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Terwujudnya SDM Polisi Pamong Praja yang tangguh sehingga mampu melayani dan mengayomi masyarakat yang lebih baik	Meningkatkannya Profesionalisme Pol.PP dalam melaksanakan tugas	Meningkatnya SDM Anggota Pol.PP yang tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas	Peningkatan Profesionalisme Pol.PP melalui pelaksanaan pendidikan dan latihan	Pembinaan kesamaptaaan dan peningkatan SDM Anggota Sat Pol PP	

MISI : 2. Terciptanya situasi keamanan daerah yang kondusif

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ketentraman, ketertiban umum	Pembinaan trantibum dan pemeliharaan kamtibmas	Pembinaan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah	

MISI : 3. Menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Keputusan Bupati

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Terwujudnya masyarakat untuk memiliki ijin usaha	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilihan ijin usaha	Meningkatnya pengetahuan pengusaha tentang perijinan	Sosialisasi tentang perijinan	Pembinaan para pengusaha	

MISI : 4. Melakukan koordinasi dengan Polri, TNI, Dinas / Instansi terkait serta aparat penegak hukum.

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum dengan meningkatkan kerja sama antar Instansi dalam melaksanakan penyelenggaraan Trantibum.	Terciptannya keamanan di wilayah Kabupaten Lamongan.	Meningkatnya keamanan di wilayah Kabupaten Lamongan.	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum.	Keamanan dan ketrtiban umum.	

MISI : 5. Mendorong terciptanya peningkatan pendapatan asli daerah

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Terwujudnya kesadaran masyarakat pengusaha membayar pajak dengan retribusi daerah	Meningkatnya wajib pajak / retribusi membayarat tepat waktu	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya kerjasama dan koordinasi aparat pemungut	Pendapatan Asli Daerah meningkat	

Lamongan 31 Januari 2007

KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. SUWADJI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 010 086 158

RENCANA KERJA TAHUNAN

Instansi : Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

SASARAN				KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA PENYAMPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA PENYAMPAIAN (TARGET)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya keamanan dan ketertiban umum.	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban umum	24 Kali	Pembinaan masyarakat	Pembinaan Trantibuman ✓	Input Dana Output Jumlah Orang yang mendapat pembinaan	Rp. Orang	20.000.000,- 100	
Pembinaan Kesamaptaan dan Peningkatan SDM Anggota Sat Pol PP Kab.dan Kasie Trantib Kec Se-Kab Lamongan	Meningkatnya Profesionalie Anggota Sat Pol PP	100 orang	Pembinaan Anggota Sat Pol PP Kab dan Trantib Kec.	Pembinaan Kesamaptaan dan Peningkatan SDM ✓	Input Dana Output Jumlah peserta pembinaan Kesamaptaan dan Peningkatan SDM	Rp. Orang	60.000.000,- 500	
Peningkatan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan pengamanan secara langsung kepada para penyandang nasalah kesejahteraan sosial (PMKS)	- 18 kali operasi WTS - 18 kali Operasi gepeng, Anjal dan orgil	Penertiban pembinaan WTS Penertiban Gepeng, Anjal dan Orgil	Meningkatkan ✓ dan menciptakan kota lamongan yang tertib, aman dan tentram serta bersih dan indah	Input Dana Output Operasi PMKS Outcome Operasi penertiban	Rp. Orang kali	60.000.000,- 80 18 kali	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya keamanan di wilayah Kabupaten Lamongan	Meningkatnya keamanan di wilayah Kabupaten Lamongan	28 kali	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lamongan	Operasi pengamanan di wilayah kabupaten Lamongan. ✓	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Operasi Keamanan	Rp. kali	65.000.000,- 28	9 9
Terciptanya kesadaran untuk mematuhi peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	Pelaksanaan Operasi PKL, Perijina, Miras, Reklame dan Bangli	62 Kali	Operasi yustisi	Penegakian Perda dan SK Bupati serta meningkatkan / Pemasukan PAD	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Operasi PKL, perijina, mirs Reklame, Bangli	Rp. kali orang	100.000.000,- 120 200	
Terciptanya Ketertiban Umum	Pelaksanaan Operasi KTP dan Material	KTP = 3 Kali Material = 12 Kali	Operasi Trantibum	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kesadaran Masyarakat di Kab Lamongan	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Operasi Material dan KTP	Rp. kali orang	25.000.000,- 15 200	
Operasi Penertiban PNS dan Pamakain Kendaran Dinas	Meningkatkan Disiplin PNS dan Pemakai Kendaraan Dinas	8 Kali	Tingkat Kesadaran PNS dan Pemakai Kendaraan dinas	PNS dan Pemakaian Kendaraan Dinas	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Operasi PNs dan Pemakai Kendaraan Dinas	Rp. kali orang	35.000.000,- 8 80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peringatan HUT dan Jambore Sat Pol Se- Prop Jatim	Terselenggaranya Peringatan HUT dan Jambore Sat PolPPdengan Sukses	2 Kali	Penyiapan Tenaga Pengendali dan Kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Peringatan HUT dan Jambore Sat Pol PP	Input Dana Output Anggota Sat Pol PP	Rp. kali	25.000.000,- 2	

Lamongan, 31 Januari 2008

KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN



[Signature]
Drs. SUWADJI, MM
Pembina Tk I

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

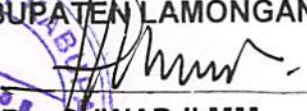
PROGRAM	KEGIATAN						
URAIAN	URAIAN	INDIKATOR	SASARAN	RENCANA RT PENCAPAIAN (TARGET)	REALISASI	TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembinaan masyarakat	Pembinaan trantibum	<u>Input</u> Dana	Rp.	20.000.000,-	20.000.000,-	100 %	
		<u>Output</u> Jumlah orang yang mendapat pembinaan	orang	100	100	100 %	
Pembinaan Kesamaptaan dan Peningkatan SDM Anggota Sat Pol PP Kab.dan Kasie Trantib Kec Se- Kab Lamongan	Meningkatkan SDM Anggota Sat Pol PPKab dan Trantib Kec.	<u>Input</u> Dana	Rp.	60.000.000,-	60.000.000,-	100 %	
		<u>Output</u> Jumlah peserta pembinaan Kesamaptaan dan Peningkatan SDM	orang	500	500	96 %	
Peningkatan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan pengamanan secara langsung kepada para penyandang nasalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<u>Input</u> Dana	Rp.	60.000.000,-	60.000.000,-	100 %	
		<u>Output</u> Operasi penertiban	kali	32	32	100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
Operasi Pengamanan Wilayah Terpadu	Meningkatnya keamanan di wilayah Kabupaten Lamongan	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Operasi Keamanan	Rp. kali	65.000.000,- 28	65.000.000,- 28	100 % 100 %	
Operasi Yustisi dan Penegakan Perda	Pelaksanaan Operasi PKL, Perijina, Miras, Reklame dan Bangli	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Operasi PKL, perijina, mirs, Reklame dan Bangli	Rp. Kali	100.000.000,- 62	100.000.000,- 62	100 % 100 %	
Operasi Trantibum	Pelaksanaan Operasi KTP dan Material	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Operasi Material dan KTP	Rp. Kali	25.000.000,- 15	25.000.000,- 15	100 % 100 %	
Operasi Penertiban PNS dan Pamakain Kendaran Dinas	Meningkatkan Disiplin PNS dan Pemakai Kendaraan Dinas	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Operasi PNs dan Pemakai Kendaraan Dinas	Rp. Kali	35.000.000,- 8	35.000.000,- 8	100 % 100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
Peringatan HUT dan Jambore Sat Pol Se-Prop Jatim	Terselenggaranya Peringatan HUT dan Jambore Sat PolPPdengan Sukses	<u>Input</u> Dana <u>Output</u> Kualitas Peringatan HUT dan Jambore Sat Pol PP	Rp. Kali	25.000.000,- 2	25.000.000,- 2	100 % 100 %	

Lamongan, 31 Januari 2008

KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN


Drs. SUWADJI, MM
Pembina Tk I
Nip. 010 086 158

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Instansi : Kantor Polisi Pamong Praja kabupaten Lamongan

SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	RENCANA CAPAIAN SASARAN TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6
Pembinaan Trantibum	Pembinaan trantibum	200 Orang	200 Orang	100 %	
Pembinaan Kesamaptaan dan Peningkatan SDM Angg Sat Pol PP Kab.dan Kasie Trantib Kec Se- Kab Lamongan	Meningkatkan SDM Anggota Sat Pol PPKab dan Trantib Kec.	100 Orang	100 Orang	100 %	
Peningkatan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan pengamanan secara langsung kepada para penyandang nasalah kesejahteraan sosial (PMKS)	32 Kali	32 Kali	100 %	
Operasi Pengamanan Wilayah Terpadu	Meningkatnya keamanan di wilayah Kabupaten Lamongan	28 Kali	28 Kali	100 %	
Operasi Yustisi dan Penegakan Perda	Penegakian Perda dan SK Bupati serta meningkatkan / Pemasukan PAD	62 Kali	62 kali	100 %	
Operasi Trantibum	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kesadaran Macyarakat di Kab Lamongan	15 Kali	15 Kali	100 %	
Operasi Penertiban PNS dan Pamakain Kendaran Dinas	Meningkatkan Disiplin PNS dan Pemakai Kendaraan Dinas	6 kali	6 kali	100 %	

